

MANAJEMEN MITIGASI KRISIS PANGAN DI ERA PANDEMI COVID-19

FOOD CRISIS MITIGATION MANAGEMENT IN THE COVID PANDEMIC ERA 19

A. Jusriadi, ST.MM¹, Laode Amijaya Kamaluddin², A .M. Azhar Aljurida³

¹Yayasan Pendidikan Al Azhar Sinjai

²STIE Nobel Makassar

³Universitas Indonesia Timur

Email: azharaljurida51@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic outbreak has dragged people into a big problem, the way the epidemic spreads that made human interaction a medium of distribution made the pattern of interactions change in a fast and drastic period, limiting the movement of people and goods was believed to be the solution to stop the spread of Covid-19. As a result the chain distribution is hampered in all lines including food, several countries in the world including Indonesia are threatened by a food crisis due to the loss of balance or supply with the amount of consumption. This study aims to gather information from various sources to be analyzed with a critical analysis approach to discourse that examines the meaning and substance behind the Covid-19 event and the threat of a food crisis. The findings of the analysis show that Indonesia is threatened by a food crisis due to the stock of rice reserves controlled by the Government through the Logistics Agency (BULOG) only available for several months. Therefore, it is necessary to mitigate the food crisis management by strengthening the role of Bulog in absorbing farmers' production, and giving an expansion of authority to make policies in the provision of food stocks during the Covid 9 pandemic to create certainty of meeting people's food needs.

Keywords: Management, Food Crisis, Covid-19.

ABSTRAK

Wabah pandemi Covid-19 telah menyeret manusia dalam masalah besar, cara penularan wabah yang menjadikan interaksi manusia sebagai media penyebaran menjadikan pola interaksi berubah dalam kurun waktu yang cepat dan drastis, pembatasan pergerakan orang dan barang diyakini sebagai solusi untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Alhasil mata rantai distribusi menjadi terhambat disegala lini tak terkecuali pangan, beberapa negara didunia termasuk Indonesia terancam krisis pangan disebabkan hilangnya keseimbangan atau pasokan dengan jumlah konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk dianalisis dengan pendekatan analisis kritis diskursus yang mengkaji tentang makna dan substansi dibalik peristiwa Covid-19 dan ancaman krisis pangan. Hasil temuan analisis menunjukkan bahwa Indonesia terancam krisis pangan disebabkan stok cadangan beras yang dikuasai oleh Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) hanya tersedia selama beberapa bulan. Olehnya itu diperlukan manajemen mitigasi krisis pangan melalui penguatan peran Bulog dalam menyerap produksi petani, dan memberi perluasan kewenangan untuk

membuat kebijakan dalam hal penyediaan stok pangan di masa pandemi Covid 19 guna menciptakan kepastian terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat.

Kata Kunci : Manajemen, Krisis Pangan, Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merebak sejak awal Februari 2020, tetapi belum diyakini, mulai dari Presiden, para Menteri, para Politisi dan termasuk para intelektual, semua yakin wabah Corona tidak akan sampai ke Indonesia. menjelang awal minggu kedua bulan maret, Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia sibuk memberikan statemen untuk mengatasi Covid-19, seluruh potensi dan sumberdaya negara mulai digerakkan untuk mengatasi Covid-19 yang telah terlanjur masuk dan gagal dihalau oleh Pemerintah.

Penanganan Covid-19 yang belum juga reda dan enggan tunduk pada penanganan para ilmuwan semakin mempertegas posisi Indonesia diambang bencana wabah Nasional. Kondisi tak kunjung membaik, Presiden Joko Widodo pada 13 April 2020 menetapkan Covid-19 sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam. Peyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, penetapan diikuti dengan Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Salah satu upaya yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah melalui himbauan kepada masyarakat untuk berada dirumah dan menerapkan *physical distancing* guna memutus rantai peredaran Virus Corona, namun karena tidak maksimal dipatuhi sehingga angka positif terus bertambah.

Beberapa daerah yang telah termasuk kedalam zona merah wabah, mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Pemerintah Pusat dengan muatan kebijakan membatasi semua akses gerakan ekonomi masyarakat dengan menutup pusat-pusat kegiatan publik yang dikhawatirkan menjadi klaster baru penyeberan Covid, tentunya langkah tersebut bukan tanpa masalah akibatnya terjadi PHK besar-besaran dan puluhan ribu orang kehilangan mata pencaharian. Alhasil penambahan orang miskin baru diperkotaan. Menurut prediksi Menteri

Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa pengangguran akan naik 5,2 juta orang diakibatkan oleh pandemi Covid termasuk Gross Domestic product (GDP) bergeser dari 5,3 persen di prediksi turun hingga 2,3 persen sehingga berdampak pada sosial dan pembangunan Indonesia. Berarti kemungkinan terburuk angka kemiskinan akan naik lagi menjadi 3,78 juta orang miskin baru dari sebelumnya hanya berkisar 1,1 juta orang miskin.

Kebijakan penanganan Covid-19 oleh Pemerintah, eskalasinya meningkat dan diperketat dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sampai ke daerah seperti beberapa Kabupaten/Kota sudah melaksanakan karantina wilayah, hal ini juga telah banyak di laksanakan di seluruh tingkatan hirarki pemerintahan bahkan sampai ke desa-desa. DKI sebagai Magnitude pembangunan dan ekonomi terbesar sekaligus sebagai Pusat Ibukota Negara, terlebih dahulu melakukan PSBB sehingga aktivitas Kota Jakarta lumpuh total mengalami “*slowdown*” pergerakan ekonomi, seluruh infrastruktur ekonomi terhenti. Pelaksanaan PSBB di Kota Jakarta ini tentu berdampak pada kota-kota penyangganya dan kota besar lainnya di pulau Jawa; seperti Jabar, Jateng, Jatim, dan seluruh propinsi lainnya dan diikuti oleh kabupaten kota di Indonesia.

Secara kritis kondisi diperparah dengan kondisi situasi krisis pangan terutama beras secara nasional, karena pada bulan Mei 2020, situasi dimana umat Islam akan melaksanakan pembayaran zakat 2,5 Kg beras per jiwa menjelang akhir bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Adapun jumlah umat yang akan mengeluarkan zakat membutuhkan beras paling tidak sekitar 200 juta jiwa penduduk Indonesia setara beras sebesar 500 ribu ton dalam bulan April hingga Mei dimana penggunaannya serentak dibutuhkan dalam satu waktu, tentu hal ini akan menimbulkan problematika tersendiri terhadap posisi pangan Nasional dengan kata lain terjadi peningkatan permintaan dalam jumlah besar, bersifat simultan dan wajib dipenuhi, menurunnya aktivitas usaha dan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat turut mempengaruhi *supply chain* sektor pangan khususnya beras sehingga ancaman krisis pangan semakin di depan mata,

sehingga sangat dibutuhkan manajemen mitigasi pangan yang sesuai dengan kondisi Nasional di tengah wabah Covid-19.

Beberapa penelitian menggambarkan tentang ketahanan pangan di masa Covid-19 ini, diantaranya penelitian yang dilakukan Masniadi et al (2020) bahwa di tengah pandemi Covid-19 bidang pangan menghadapi masalah pokok yaitu meningkatnya jumlah desa rawan pangan. Penyebab utama masalah ini adalah belum tercapainya pola pangan harapan (PPH) dan masih adanya daerah yang masuk dalam status rawan pangan kategori prioritas. Penelitian yang dilakukan Kurniawati et al (2020) dan Thesiwati (2020) menawarkan solusi atas masalah pangan yang dihadapi di masa Covid-19 yaitu konsep ketahanan pangan dengan pemanfaatan lahan terbatas seperti hidroponik, akuaponik dan *polybag* serta pekarangan rumah. Solusi yang menarik dari penelitian Rahmawati (2020) bahwa e-commerce berperan dalam mempersingkat distribusi serta menekan stabilitas harga pangan saat pandemi Covid-19, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur sebagai metode pengumpulan data untuk menelusuri peristiwa yang hendak dikaji (Bungin,2009) selanjutnya pendekatan yang dipilih adalah *Critical Discourse Analysis* (Analisa Diskursus Kritis) yang mengasumsikan bahwa semua objek dan tindakan adalah penuh makna secara khusus, dan setiap diskursus menunjukkan konstruksi sosial dan politik pada obyek yang diamati. Menurut Howard (2000:2), teori diskursus mencari bagaimana praktek-praktek sosial mengartikulasikan dan mempertentangkan situasi yang membentuk realitas. Langkah peran peneliti adalah menyajikan permasalahan, mengumpulkan data historis pada kurun waktu februari hingga Mei 2020, lalu mengekstrak kumpulan makna untuk disajikan kembali dalam bentuk hasil penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Ancaman Krisis Pangan

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO mengidentifikasi 27 negara terancam mengalami krisis pangan karena pandemi Covid-19. Analisis terbaru FAO dan Program Pangan Dunia atau WFP menunjukkan bahwa pandemi memperparah situasi pangan di negara-negara yang sebelumnya rentan terhadap krisis dan kelaparan. FAO dan WFP menyatakan tak ada yang kebal terhadap krisis pangan. Di Asia, kelaparan mengancam negara-negara seperti Afghanistan dan Bangladesh, sementara di Amerika Tengah yakni Haiti, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Peru, Ekuador, dan Kolombia, termasuk di Indonesia juga mengalami ancaman krisis yang sama (Sidharta, 2020; Pratt & Frost, 2020 dan Xafis, 2020).

FAO dan WFP mencatat empat faktor utama bagaimana pandemi virus corona dapat mendisrupsi krisis pangan lebih dalam. *Pertama*, lapangan kerja dan upah yang menurun. *Kedua*, disrupsi penanganan pandemi pada produksi dan pasokan pangan dunia. *Ketiga*, menurunnya pendapatan pemerintah, dan *keempat*, meningkatnya ketidakstabilan politik yang memicu konflik berbasis sengketa sumber daya alam. Sementara itu, berdasarkan survei oleh FAO dan WFP, produksi pangan di masa pandemi muncul sebagai tantangan serius. Petani yang disurvei melaporkan banyak tantangan dalam mengakses benih, sehingga mengurangi penanaman, dinamika ini kemungkinan akan mengarah ke lingkaran setan penurunan produksi yang memicu kekurangan kesempatan kerja pertanian dan meningkatnya harga, serta memburuknya ketahanan pangan dan gizi nasional.

Di Indonesia sendiri pada Bulan Mei 2020 adalah bulan dimana situasi penanganan Covid sudah memasuki hari ke 50, namun Pemerintah baru mengambil keputusan mengucurkan APBN sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani Pandemi Covid-19 didalam Negeri. Sebagian besar dana tersebut akan dialokasikan untuk insentif pembiayaan program pemulihan ekonomi sebesar Rp

150 Triliun, sebesar Rp 110 triliun untuk Program perlindungan sosial (*social Safety net*) dan Rp 75 triliun untuk insentif di sektor kesehatan. Sementara sisanya sebesar 70, 1 triliun digunakan untuk insentif perpajakan dan stimulan KUR (kredit usaha rakyat). Jadi yang benar-benar untuk penanganan Covid-19 hanya Rp 75 triliun saja. Lantas bagaimana dengan penanganan di sektor pangan, jumlah anggaran yang dikucurkan untuk sektor pangan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Padahal jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 271 Juta jiwa membutuhkan pangan pokok beras, lalu akan terjadi permintaan di bulan “Mei 2020” akan terjadi. Ada peristiwa yang perlu dicermati dan diatasi karena dibutuhkan pangan beras dalam waktu bersamaan, antara lain: pertama; Ramadhan akan berakhir dibulan Mei, sedangkan ummat Islam akan menunaikan Kewajiban membayar Zakat dengan membutuhkan Beras 2,5 kg perjiwa, dan diperkirakan 200 juta jiwa Ummat yang menunaikan bayar Zakat sebesar 500 ribu Ton beras, untuk didistribusikan pada H minus 1 di Hari Raya idul fitri bagi fakir miskin dan anak yatim piatu diseluruh pelosok negeri. Kedua; Bertambahnya Orang miskin baru diperkirakan sebesar 5,2 juta akibat pandemi Covid-19 yang tidak memiliki pekerjaan karena baru di PHK, dirumahkan, mereka akan menjadi penambah jumlah orang miskin di Indonesia. Artinya akan meningkat permintaan beras dipasaran, apabila tidak ditangani dengan profesional akan berujung pada instabilitas harga bahan pangan di pasaran.

Mengatasinya tentu harus dengan impor beras namun hal ini menjadi sulit karena Pemerintah tidak memiliki dana untuk itu, dan tentu harga beras internasional di negara eksportir akan menahan guna kepentingan dalam negerinya. Ketiga; Bulan Mei merupakan puncak panen padi sawah yang sedianya pada saat seperti ini padi yang sudah di panen mencapai sekitar 60% dari target panen nasional pada semester pertama tahun 2020. Percepatan panen yang biasanya menggunakan mesin pemotong padi (*harvester combine*) sulit di mobilisasi karena terkendala pemberlakuan PSBB sehingga kemungkinan panennya secara manual, padahal tenaga penebas diwaktu panen raya sudah

banyak yang beralih kerja di bidang jasa dan lainnya, warning telah dikeluarkan oleh organisasi pangan dan pertanian FAO memperingatkan dunia akan potensi terjadinya kelangkaan dan darurat pangan di beberapa negara ditengah wabah Covid-19, kebijakan lockdown (penguncian) di sejumlah negara membuat distribusi pangan terganggu (Rozaki, 2020).

Tak bisa dipungkiri, kecukupan bahan pangan menjadi amunisi utama sebuah negara bertahan ditengah pandemi Covid-19. Sayangnya, Indonesia masih menggantungkan ketersediaan sejumlah bahan pangan dari impor karena minimnya produksi di dalam Negeri. Peneliti *Center for Food, Energy and Sustainable Development Indef*, bahwa kondisi defisit pangan sebetulnya bukan hal baru. Defisit bahan pangan kerap dialami Indonesia bahkan jauh sebelum pandemi Indonesia mengalami defisit namun tidak mengkhawatirkan dikarenakan dipasar global negara yang menjadi importir pangan cukup tersedia, namun berbeda halnya di tengah masa pandemic, Negara yang selama ini menjadi supplier pangan bagi Negara lain saat ini lebih memilih mengamankan kebutuhan dalam Negeri mereka, itupun ketika mau menjual tentu dengan harga yang lebih mahal dibanding sebelumnya, sebagai konklusi kekuatan internal bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan menjadi satu-satunya harapan.

Menemukan *Leading Sektor Pangan*

Menata ulang manajemen logistik, stok beras yang dikuasai Pemerintah terbesar ada Bulog. Untuk mengatasi kelangkaan beras lalu solusinya di pasok dari mana? mengingat bulan Mei juga kita sudah memasuki musim paceklik dan sekaligus musim kemarau, April - Oktober 2020. BMKG belum memastikan kemarau ini akan panjang atau tidak. Sedangkan musim hujan sudah lewat November 2019 sampai dengan Maret 2020.

Sejak awal Januari tahun 2020, kita sudah mengalami kekurangan beras defisit stok. Sedangkan stok Bulog diawal tahun memiliki stok awal sekitar 2,3 Juta ton, sedangkan perkiraan penyaluran sebulan berkisar 300 ton, dan telah disalurkan sampai dengan april, maka stok bulan Mei di perkirakan 1,1 juta ton. Apabila pengadaan sama dengan tahun-tahun sebelumnya berkisar 300 ribu ton

sampai dengan 600 ribu ton sampai dengan bulan April, maka saat ini mungkin di tengah Pandemi Covid-19 tentu pengadaan Bulog tidak maksimal dan belum akan mencapai 200 ribu ton.

Asumsinya dengan menggunakan data pengadaan tahun 2018, maka data BPS hasil survey tahun 2015, stok yang dikuasai oleh Rumah Tangga sebesar 47,57% yang tertinggi dan terbesar berasnya. Bulog hanya menguasai beras 19,30 %, sedangkan Pedagang termasuk yang di kuasai *Food Station* sebesar 18,32%, penggilingan Beras menguasai 8,22 % dan sisanya Horeka (Hotel, Restoran dan kafe) menguasai beras sebesar 6,59%. Posisi beras yang besar dan ready stok hanya dikuasai BUMN Perum Bulog, sedang yang lainnya sulit di manage oleh Pemerintah. Ditengah situasi disrupsi pandemi Covid-19, dan untuk urusan perut (pangan) maka tidak boleh tidak Negara harus menjamin ketersediaan beras kepada rakyatnya agar menjadi kepastian hadirnya negara dalam urusan pangan (Kurniawati et al, 2020).

Tidak bisa lagi ke depan menyerahkan pangan ini kepada mekanisme pasar akan sangat berbahaya. Maka harus ada instrumen negara yang berfokus menciptakan kepastian pangan bagi rakyatnya. Instrumen itu adalah BULOG, yang sejatinya harus segera ditugaskan untuk menjamin kepastian dalam kondisi apapun bukan lagi sebagai pemadam kebakaran, itulah bentuk mitigasi dan roadmap dalam penyelesaian krisis pangan saat ini. BULOG tidak hanya ditugasi pada mengelola Stock pangan tapi harus lebih dari itu, BULOG harus direorientasikan memiliki jaminan kepastian pasokan, BULOG harus diberi untuk menyusun kebijakan strategis agar setiap produksi pangan, ada jumlah prosentase (%) yang harus dikuasai oleh negara melalui BULOG (Patunru et al, 2020).

Sebetulnya melalui Keppres RI No. 50/1995 BULOG ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya. Pada era Orde Baru, BULOG sangat kuat dan posisi strategisnya berada langsung di bawah Presiden. BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BULOG saat LPND merupakan

sebuah lembaga yang diciptakan khusus, baik dari bentuk usaha, jenis usaha dan pelaporan keuangannya. Kedudukannya adalah sebagai sebuah lembaga pemerintah strategis yang sifatnya “otonom” dan berada di luar pengawasan departemen. Secara administrative BULOG berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara sejak tahun 1973, tetapi dalam prakteknya, KaBULOG bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Hak istimewa BULOG ini mengakibatkannya mempunyai suatu kewenangan khusus sehingga tidak tersentuh oleh peraturan pemerintah, dan terus terjadi hingga keluarnya Keppres No.103/2001. Jadi, BULOG menikmati masa istimewanya selama 28 tahun. Pada dasarnya, posisi istimewa BULOG disebabkan oleh tugas dan fungsinya yang penting, yakni menguasai hajat hidup rakyat banyak. Pembentukan suatu STE oleh suatu negara, baik dalam bentuk *State-owned Enterprise* (Badan Usaha Milik Negara), perusahaan swasta atau dalam bentuk lainnya dilakukan melalui pemberian hak istimewa oleh Pemerintah untuk orang atau badan hukum tertentu.

Sejak tanggal 6 Desember 1993, Pemerintah melalui perwakilan tetap Republik Indonesia di Jenewa telah melakukan notifikasi BULOG. Implikasinya maka BULOG memperoleh status sebagai *sole importer* atau *sole exporter* yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan monopoli impor/ekspor terhadap komoditas-komoditas pertanian tertentu sesuai dengan penggarisan kebijakan pangan oleh pemerintah.

Presiden sendiri pun telah meminta kepada Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso agar melakukan manajemen beras dengan baik, BULOG dianggap menjadi kunci, BULOG diminta melakukan kalkulasi secara detail mengenai ketersediaan stok di masyarakat, dipenggilingan, stok digudang-gudang Bulog. Presiden juga meminta agar pada panen raya dapat menyerap beras masyarakat dengan maksimal membeli gabah petani dengan dan melakukan penyerapan dengan maksimal selain itu diperlukan secara maksimal pemetaan daerah dan wilayah yang menjadi sumber pangan terbesar dan daerah yang potensial untuk dikembangkan, hanya dengan cara itu kepastian terwujud, namun itu hanya salah

satu aspek untuk membuat kepastian, masih ada beberapa lagi, baik dalam distribusi, pengelolaan stock, pembiayaan dan lain-lain, pilihannya sederhana urus pangan dengan baik atau krisis pangan menanti.

Mengantisipasi atau mencegah kemungkinan krisis pangan selama maupun pasca-wabah COVID-19, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam jangka pendek. *Pertama*, hentikan pangan sebagai bisnis. Pangan adalah hak yang harus dijamin pemenuhannya. *Kedua*, gerakkan BULOG untuk siaga nasional penyangga pangan. *Ketiga*, penyiapan pangan untuk wilayah yang ditutup maksimal. *Keempat*, stabilitas harga pangan. Upaya yang harus dilakukan masyarakat adalah terus pelihara solidaritas dan bangun lumbung pangan lokal. Kawal penggilingan beras di desa, segera jemur gabah untuk persiapan darurat beras, galakkan beli langsung dari petani dan komunitas petani untuk memperpendek rantai distribusi.

Bertani secara ekologis [agroekologi] untuk menghasilkan pangan yang sehat. Ada juga upaya jangka panjang yang harus dilakukan pemerintah. *Pertama*, membuat visi baru pertanian Indonesia. *Kedua*, menghidupkan kembali lumbung pangan yang dikelola masyarakat dan desentralisasi penyediaan pangan nasional. *Ketiga*, bangun sistem pangan lokal yang terintegrasi dan segera siapkan skema pemotongan rantai pasok dan distribusi yang panjang. *Keempat*, laksanakan amanat UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mewujudkan kawasan pertanian pangan agro ekologis dengan penguasaan lahan per RTP minimal 2 hektar, dan integrasi dari *on farm* – *off farm*. Dengan begitu, petani menikmati nilai tambah dan pangan olahan segar berkualitas

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia menyebabkan perubahan yang signifikan dalam struktur interaksi sosial yang terjadi pada manusia, terbatasnya pergerakan barang dan orang di yakini sebagai langkah efektif untuk

memutus peredaran mata rantai Covid-19. Untuk konteks Indonesia, bentuk mitigasi bencana wabah yang dilakukan oleh Pemerintah melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrument kebijakan yang membatasi pergerakan barang dan orang, efek domino yang timbul dari kebijakan ini adalah terjadinya krisis pangan nasional, tingginya tingkat konsumsi nasional disebabkan wabah pandemi bersamaan dengan bulan suci Ramadhan sehingga angka konsumsi meningkat. Pemerintah belum menyentuh persoalan pangan secara nyata, sementara kondisi pangan sudah diambang krisis dan defisit, cadangan pangan pemerintah yang dikuasai BULOG hanya bisa bertahan selama kurang lebih satu bulan. Olehnya itu manajemen mitigasi krisis pangan sebagai satu-satunya solusi dengan memperkuat peran BULOG untuk menyerap gabah dan beras petani, serta diberi kewenangan baru untuk manata ulang manajemen penyediaan pangan di tengah pandemi.

REFERENSI

- Bungin, Burhan. (2009). Analisis Penelitian Data Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo
- Gadnerd, Howard. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century, New York: Basic Books, 1999.
- Kurniawati, W., Erviana, L., & Desstya, A. (2020). Solusi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perkotaan Saat Pandemi Covid-19. Malay Local Wisdom in the Period and After the Plague, 95.
- Masniadi, R., Angkasa, M. A. Z., Karmeli, E., & Esabella, S. (2020). Telaah Kritis Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 1(2), 109-120.
- Patunru, A., Hatta, G. O., & Audrine, P. (2020). Mitigating Food Supply Chain Disruptions Amid Covid-19.
- Pratt, B. A., & Frost, L. (2020). COVID-19 and the Status of Women's, Children's, and Adolescents' Health and Rights: A Targeted Literature Review of Current Evidence for Action on Universal Health Care (UHC) and Accountability.
- Rahmawati, L. (2020). Peran E-commerce dalam Mendukung Ketahanan Pangan Wilayah Jakarta Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 8(2).

Rozaki, Z. (2020). COVID-19, Agriculture, and Food Security in Indonesia. *Reviews in Agricultural Science*, 8, 243-260.

Sidharta, V. (2020). Food Supply Chain And Food Security During the Covid-19 Pandemic. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(3).

Thesiwati, A. S. (2020). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Pangan Lestari di Masa Covid-19. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA*, 3(2), 25-30.

Xafis, V., Schaefer, G. O., Labude, M. K., Zhu, Y., & Hsu, L. Y. (2020). The perfect moral storm: Diverse ethical considerations in the COVID-19 pandemic. *Asian Bioethics Review*, 1.

UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Covid-19

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang bencana non alam peyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional